

ANALISIS GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN KESEHATAN PERUSAHAAN BUMN

(Studi pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta)

Verra Febrina Christi
Moch. Dzulkirrom AR
Achmad Husaini
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya
Email: verrafebrinachristi@gmail.com

ABSTRAK

Tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance(GCG) merupakan sistem pengelolaan dan pengendalian perusahaan dengan tetap memperhatikan aturan perundang-undangan untuk menciptakan nilai tambah perusahaan.Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan bentuk nyata dari investasi negarayang bertujuan mendorong dan memacu perkembangan aktivitas perekonomian negara terutama negara berkembang.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan good corporate governanceyang meliputi penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran, serta untuk mengetahui kesehatan perusahaan yang masing-masing indikator pelaksanaannya diberi skor bobot sesuai dengan pedoman penilaian tingkat kesehatan BUMN. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dengan menggunakan data keuangan selama periode 2010 sampai 2012. Deskripsi penerapan good corporate governance pada aspek keuanganmeliputi analisis rasio-rasio keuangan yaitu rasio likuiditas, profitabilitas, aktivitas, dan leverage.Obyek dalam penelitian ini adalah PT. KAI (Persero) Daop 6 Yogyakarta. Hasil dari penerapan good corporate governance selama tahun penelitian dilaksanakan dengan baik. Hasil dapat dilihat pada tahun 2010 sebesar 73% kemudian tahun 2011 menjadi 67,5% dan pada tahun 2012 kembali naik menjadi 73,5%. Hal ini menunjukkan bahwa pada masing-masing tahun, kinerja perusahaan memiliki skor “A” yang berarti sehat.

Kata kunci: *good corporate governance*, kesehatan perusahaan

1. PENDAHULUAN

Penerapan *good corporate governance* (GCG) meningkat setelah krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997. Perekonomian Indonesia yang terpuruk disebabkan oleh buruknya tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun perusahaan swasta di Indonesia yang terjadi pada saat itu. Hal ini menyebabkan berkurangnya kepercayaan investor di Indonesia, sehingga hutang negara bertambah dan berkurangnya pendapatan negara. “Berbagai upaya memperbaiki tata kelola dilakukan dengan menerapkan prinsip

GCG di semua lini masyarakat” (Zarkasyi, 2008:1).

Pengertian *corporate governance* adalah “sistem cek dan *balance* antara pihak internal dan eksternal perusahaan yang memberikan keyakinan bahwa perusahaan menjalankan akuntabilitasnya kepada semua *stakeholders* dan bertindak dalam kerangka pertanggungjawaban untuk seluruh area aktivitas perusahaan” (Djanegara, 2008:8).Manfaat GCG antara lain meningkatkan keyakinan pemegang saham dan *stakeholders* lainnya terhadap

kemampuan mengelola dan meningkatkan kinerja perusahaan.

Kinerja perusahaan merupakan hasil yang diperoleh suatu perusahaan pada periode tertentu. Hasil kinerja dapat diukur dan menggambarkan kondisi perusahaan pada saat itu. Pelanggaran terhadap etika bisnis sering terjadi di sejumlah perusahaan. Hal ini yang menyebabkan buruknya kinerja perusahaan, seperti budaya Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) sehingga tidak adanya kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas dalam transaksi bisnis yang berdampak pada saat penyampaian laporan keuangan perusahaan.

PT. Kereta Api Indonesia sebagai salah satu BUMN membuktikan bahwa masyarakat benar-benar memanfaatkan produk jasa yang ditawarkan, namun saat ini jumlah penumpang kereta di pulau Jawa dan Sumatera mengalami penurunan, hal ini ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1 Daftar Penumpang PT. KAI Periode Tahun 2010-2012

	2010	2011	2012	Jumlah
Penumpang di Jawa (000,000 orang)	396,056	388,082	395,590	1,179,728
Penumpang di Sumatera (000,000 orang)	5,241	5,296	4,384	14,921

(Sumber: www.bps.go.id, 2012)

Faktor yang menyebabkan turunnya jumlah penumpang adalah penurunan jumlah lokomotif kereta api yang ada sebagian besar sudah tua. Kurangnya ketersediaan suku cadang dari luar negeri menyebabkan lamanya perbaikan kereta api karena suku cadang tidak selalu tersedia. Faktor lain yang berpengaruh yaitumakin meningkatnya persaingan dengan moda transportasi lain dan menurunnya kemampuan masyarakat.

GCG tidak hanya terfokus pada perusahaan saja, tetapi menyangkut pula tentang tingkah laku manusia yang merupakan bagian dari perusahaan. Perilaku yang tidak etis akan berdampak pada kinerja perusahaan. Apabila hal ini terjadi secara terus-menerus, bukan tidak mungkin perusahaan akan mengalami kebangkrutan, berkurangnya minat para investor untuk menanamkan sahamnya, serta sanksi dari masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah “*Analisis Good Corporate Governance dan Kesehatan Perusahaan BUMN (Studi pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta)*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan *good corporate governance* dan kesehatan perusahaan pada PT. KAI (Persero) Daop 6 Yogyakarta.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1. *Good Corporate Governance*

Good corporate governance yaitu “prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha” (Kepmen BUMN, Kep-100/MBU/2002). Pengertian lain dari *good corporate governance* yaitu “sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*” (Sutedi, 2011:2). Manfaat yang diperoleh dari penerapan GCG adalah menjadikan masa depan perusahaan menjadi lebih baik karena akan meningkatkan kepercayaan dari pemodal.” Pada tahun 1999, Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIN/08/1999 telah mengeluarkan Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) yang pertama” (KNKG, 2006:1). Pedoman tersebut beberapa kali disempurnakan, terakhir pada tahun 2006. Pemerintah telah

mengubah pula nama KNKCG menjadi Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG). Pedoman ini disusun dengan tujuan agar dijadikan sebagai acuan bagi pelaksanaan *good corporate governance* oleh pelaku usaha di Indonesia.

2.2. Prinsip *Good Corporate Governance*

1. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi adalah “keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan”(Kepmen BUMN,Kep-100/MBU/2002).Terdapat metode penilaian yang merupakan penilaian aspek administrasi perusahaan yang berkaitan dengan aspek keuangan, yaitu:

a. Laporan Perhitungan Tahunan

Penyampaian laporan perhitungan tahunan merupakan laporan keuangan secara keseluruhan per 31 Desember pada tahun yang bersangkutan. Penentuan penilaian yang diberikan berdasarkan pada tabel 2.

Tabel2 Skor Penilaian dalam Penyampaian Laporan Perhitungan Tahunan

Jangka Waktu Laporan Audit Diterima	Skor
sampai dengan akhir bulan keempat sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup	3
sampai dengan akhir bulan kelima sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup	2
lebih dari akhir bulan kelima sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup	0

Sumber: Kepmen BUMN, Kep-100/MBU/2002

b. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

RKAP merupakan perencanaan program kerja dalam operasional perusahaan. Skor penilaian ditunjukkan pada tabel 3.

Tabel 3 Skor Penilaian dalam Penyampaian Rancangan RKAP

Jangka waktu surat diterima sampai dengan memasuki tahun anggaran	Skor
2 bulan atau lebih cepat	3
kurang dari 2 bulan	0

Sumber: Kepmen BUMN, Kep-100/MBU/2002

c. Laporan Periodik

Laporan periodik triwulan maupun semester harus diterima oleh Komisaris/Dewan Pengawas dan Pemegang Saham untuk Persero paling lambat satu bulan setelah berakhirnya periode laporan. Tabel 4 merupakan skor penilaian dalam penyampaian laporan periodik.

Tabel 4 Skor Penilaian dalam Penyampaian Laporan Periodik

Jumlah keterlambatan dalam 1 tahun	Skor
lebih kecil atau sama dengan 0 hari	3
0 < x ≤ 30 hari	2
0 < x ≤ 60 hari	1
< 60 hari	0

Sumber: Kepmen BUMN, Kep-100/MBU/2002

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip akuntabilitas yaitu “kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif” (Kepmen BUMN, Kep-100/MBU/2002).

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Pertanggungjawaban yaitu “kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat” (Kepmen BUMN, Kep-100/MBU/2002). Prinsip ini diwujudkan melalui *corporate social responsibility*, dengan memberikan perhatian kepada masyarakat sekitar melalui Pembinaan Usaha Kecil dan

Koperasi. Penilaian ditunjukkan pada tabel 5.

Tabel 5 Bobot Penilaian Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi

Indikator	Bobot	
	Infra	Non Infra
Efektivitas penyaluran	3	3
Kolektibilitas pengembalian Pinjaman	3	3
TOTAL	6	6

Sumber: Kepmen BUMN, Kep-100/MBU/2002

4. Kemandirian (*Independency*)

Kemandirian yaitu “keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat” (Kepmen BUMN, Kep-100/MBU/2002).

5. Kewajaran (*Fairness*)

Kewajaran yaitu “keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan” (Kepmen BUMN, Kep-100/MBU/2002). Penilaian aspek operasional perusahaan ditunjukkan pada tabel 6.

Tabel 6 Daftar Penilaian Aspek Operasional

Indikator yang digunakan	Bobot
1. Pemeliharaan Kontinuitas Produksi	20
2. Peningkatan Kualitas SDM	15
Total	35

Sumber: Kepmen BUMN, Kep-100/MBU/2002

2.3. Kinerja Perusahaan

2.3.1. Pengertian Kinerja

“Kinerja perusahaan merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh suatu organisasi dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar yang ditetapkan” (Zarkasyi, 2008:48). Tingkat kesehatan pada BUMN

ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap kinerja perusahaan digolongkan menjadi:

a. SEHAT, yang terdiri dari:

AAA apabila total (TS) > 95

AA apabila $80 < TS \leq 95$

A apabila $65 < TS \leq 80$

b. KURANG SEHAT, yang terdiri dari:

BBB apabila $50 < TS \leq 65$

BB apabila $40 < TS \leq 50$

B apabila $30 < TS \leq 40$

c. TIDAK SEHAT, yang terdiri dari:

CCC apabila $20 < TS \leq 30$

CC apabila $10 < TS \leq 20$

C apabila $TS \leq 10$ (KepmenBUMN, Kep-100/MBU/2002).

2.3.2. Aspek Keuangan

Perusahaan BUMN Infrastruktur maupun Non Infrastruktur memiliki indikator yang sama, dengan bobot indikator yang berbeda-beda. Indikator serta bobot masing-masing secara rinci disajikan pada tabel 7.

Tabel 7 Daftar Indikator dan Bobot Aspek Keuangan

Indikator	Bobot	
	Infra	Non Infra
1. ROE	15	20
2. ROI	10	15
3. Rasio Kas	3	5
4. Rasio Lancar	4	5
5. Collection Periods	4	5
6. Perputaran persediaan	4	5
7. Perputaran total aset	4	5
8. TMS terhadap TA	6	10
Total Bobot	50	70

Sumber: Kepmen BUMN, Kep-100/MBU/2002

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, karena hanya memberikan gambaran secara tertentu yang berkaitan dengan fakta dengan menggambarkan kondisi keuangan perusahaan melalui perhitungan beberapa rasio keuangan dan prinsip GCG. Obyek

dalam penelitian ini adalah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta.

3.1. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pemberian makna dan arti yang berguna dalam memecahkan masalah dalam penelitian(Hasan, 2002:98). Langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis prinsip *Good Corporate Governance* pada PT. KAI Daop 6 Yogyakarta, yang terdiri dari:
 - a. Transparansi (*Transparency*)
 - b. Akuntabilitas (*Accountability*)
 - c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)
 - d. Kemandirian (*Independency*)
 - e. Kewajaran (*Fairness*)
2. Menganalisis penilaian kinerja aspek keuangan berbasis akuntansi melalui teknik analisis rasio. Analisis rasio yang digunakan pada penelitian ini tidak secara lengkap, hanya yang sesuai standar ketetapan penilaian kinerja dari perusahaan. Rasio-rasio keuangan yang digunakan antara lain:
 - 1) Rasio Likuiditas
 - (a) Rasio Lancar = $\frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$
 - (b) Rasio Kas = $\frac{\text{Kas} + \text{Bank} + \text{Srt. Berharga Jk. pendek}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$
 - 2) Rasio Profitabilitas
 - (a) ROI = $\frac{\text{EBIT} + \text{Penyusutan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$
 - (b) ROE = $\frac{\text{Laba setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$
 - 3) Rasio Aktivitas
 - (a) Perputaran Persediaan = $\frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari}$
 - (b) TATO = $\frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$

$$(c) \text{ Collection Periods} = \frac{\text{Total Piutang Usaha}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

4) Rasio Leverage

$$\text{Total Modal Sendiri terhadap Total Aset} = \frac{\text{Total Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

3. Memberikan bobot nilai pada tiap indikator pada perspektif keuangan dan administrasi dari tahun 2010 sampai 2012 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-100/MBU/2002.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance*

1. Prinsip Transparansi (*Transparency*)
 - a. Transparansi dalam Penyampaian Laporan Perhitungan Tahunan
PT. KAI (Persero) Daop 6 selalu berusaha membuat laporan kurang dari 5 bulan. Sejak tahun 2010 hingga 2012 selalu membuat kurang dari 4 bulan.
 - b. Transparansi dalam Penyampaian RKAP
PT. KAI (Persero) Daop 6 dari tahun 2010 hingga 2012 selalu membuat rancangan RKAP kurang dari dua bulan sebelum memasuki tahun anggaran yang bersangkutan.
 - c. Transparansi dalam Penyampaian Laporan Periodik
PT. KAI (Persero) Daop 6 membuat laporan periodik setiap 3 bulan sekali dalam satu tahun buku.
2. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)
Prinsip ini ditunjukkan dengan *adanya reward and punishment* serta *code of conduct* bagi setiap karyawan.
3. Prinsip Pertanggungjawaban (*Responsibility*)
PT. KAI (Persero) Daop 6 memberikan perhatian pada masyarakat sekitar dengan program Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
4. Prinsip Kemandirian (*Independency*)
PT. KAI (Persero) Daop 6 menginstruksikan semua karyawan

untuk tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun.

5. Prinsip Kewajaran (*Fairness*)

PT. KAI (Persero) Daop 6 memberikan perhatian pada karyawan seperti diklat dan pelatihan, serta pemeliharaan kontinuitas produksi.

4.2. Penerapan *Good Corporate Governance* pada Kinerja Keuangan

Salah satu evaluasi kinerja perusahaan adalah dengan mengevaluasi aspek kinerja keuangan perusahaan PT. KAI (Persero) Daop 6 Yogyakarta. Aspek keuangan yang dievaluasi dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* meliputirasio keuangan. Persentase hasil perhitungan disajikan dalam tabel 8.

Tabel 8 Persentase Hasil Rasio Keuangan Tahun 2010-2012

KET	2010	2011	2012
ROE	3,078	-8,51	1,801
ROI	2,692	-10,266	1,41
Rasio Kas	63,365	84,917	75,155
Rasio Lancar	1661,2	1600,6	773,9
Collection Periods	0,973	0,579	0,58
Perputaran Persediaan	51,140	44,83	35,051
TATO	94,105	97,539	109,342
TMS terhadap TA	96,81	97,006	94,218

Sumber: Data Diolah, 2013

Indikator *Return On Equity* (ROE) pada PT. KAI (Persero) Daop 6 tahun 2010 sebesar 3,078% yang artinya tingkat pengembalian atas modal yang diinvestasikan adalah sebesar 3,078% dari laba bersih yang diperoleh perusahaan.

Pada tahun 2011 ROE sebesar -8,51%. Sedangkan pada tahun 2012 tingkat pengembalian atas modal yang diinvestasikan sebesar 1,801% dari laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan. Pencapaian ini menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan perusahaan terjadi penurunan dalam tiga tahun terakhir.

Pada *Return On Investment* (ROI) pada PT. KAI (Persero) Daop 6 Yogyakarta tahun 2010 sebesar 2,692%, tahun 2011 sebesar -10,266%, sedangkan pada tahun 2012 sebesar 1,41%. Perhitungan ROI PT. KAI (Persero) Daop 6 Yogyakarta pada tiga tahun terakhir mengalami penurunan pada tahun 2011 dan peningkatan pada 2012.

Rasio kas mengalami kenaikan yaitu 63,365% pada tahun 2010 menjadi 84,917% pada tahun 2011 dan penurunan yaitu 75,155% pada tahun 2012. Hasil perolehan rasio lancar perusahaan mengalami peningkatan pada tahun 2010. kenaikan aktiva lancar disebabkan oleh meningkatnya jumlah persediaan dan piutang yang tersedia dalam perusahaan. Hasil perolehan pada tahun 2011 adalah 1600,62% dan pada tahun 2012 sebesar 773,91%.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa *Collection Periods* pada PT. KAI (Persero) Daop 6 mengalami penurunan. Pada tahun 2010 sebesar 3,55 hari menjadi 2,11 hari pada tahun 2011 dan 2012. Hasil perputaran persediaan yang diperoleh pada tahun 2010 sebesar 186,66 hari menjadi 163,61 hari pada tahun 2011 dan 127,94 hari pada tahun 2012.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa perputaran total aset pada PT. KAI (Persero) Daop 6 mengalami peningkatan dari 94,105% pada tahun 2010 menjadi 97,539% pada tahun 2011 dan 109,324% pada tahun 2012. Peningkatan TMS terhadap TA terjadi pada 2010 sebesar 96,81% menjadi 97,006% pada tahun 2011 dan penurunan sebesar 94,218% pada tahun 2012.

4.3. Pembahasan

Berdasarkan perhitungan total bobot penilaian kinerja pada tabel 9, selama tiga tahun PT. KAI (Persero) Daop 6 Yogyakarta memperoleh nilai sehat A (nilai total skor lebih dari 65). Pada tahun 2010 skor yang diperoleh sebesar 73. Walaupun selama tiga tahun memperoleh nilai A, namun pada tahun 2011 terjadi kerugian. Skor yang diperoleh sebesar 67,5. Skor pada *Return On Equity* (ROE) dan *Return On Investment* (ROI) yang kecil menyebabkan sedikitnya total bobot yang diperoleh. Skor yang diperoleh pada tahun 2012 mengalami peningkatan dengan baik, yaitu sebesar 73,5. Peningkatan ini dikarenakan PT. KAI (Persero) Daop 6 mampu meningkatkan laba perusahaan. PT. KAI (Persero) Daop 6 mampu meningkatkan kinerja dengan berupaya meminimalkan biaya yang dikeluarkan. Tabel 9 menunjukkan total bobot penilaian kinerja PT. KAI (Persero) Daop 6 Yogyakarta.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Penerapan *good corporate governance* untuk menilai kinerja perusahaan pada PT. KAI (Persero) Daop 6 Yogyakarta dapat memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan secara keseluruhan.
2. Prinsip-prinsip *good corporate governance* yang dilaksanakan pada PT. KAI (Persero) Daop 6 meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran telah dilaksanakan dengan baik.
3. Kinerja PT. KAI (Persero) Daop 6 Yogyakarta yang dinyatakan dalam tingkat kesehatan perusahaan BUMN dapat dikatakan baik. Meskipun terjadi kerugian pada tahun 2011, kinerja perusahaan memiliki nilai sehat "A" selama tahun 2010, 2011, dan 2012.

Tabel 9 Total Bobot Penilaian Kinerja PT KAI (Persero) Daop 6 Yogyakarta

Indikator	Tahun		
	2010	2011	2012
Laporan Tahunan	3	3	3
RKAP	3	3	3
Laporan Periodik			
Efektifitas Penyaluran	3	3	3
Tingkat Kolektibilitas	3	3	3
Total	12	12	12
Kontinuitas Produksi	19	19	20
Peningkatan Kualitas SDM	15	15	15
Total	34	34	35
Aspek Keuangan			
ROE	4	1	3
ROI	2,5	0	2,5
Rasio Kas	3	3	3
Rasio Lancar	3	3	3
Collection Periods	4	4	4
Perputaran Persediaan	4	4	4
TATO	3	3	3,5
TMS terhadap TA	3,5	3,5	3,5
Total	27	21,5	26,5
Total Bobot	73	67,5	73,5
Tingkat Kesehatan	A	A	A

Sumber: Data Diolah, 2013

5.2. Saran

1. PT. KAI (Persero) Daop 6 Yogyakarta agar selalu melakukan penilaian dan evaluasi kinerja. Dalam menilai kinerja sebaiknya mempertimbangkan berbagai permasalahan yang akan dihadapi, sehingga dapat mengantisipasi dan mengatasi permasalahan tersebut.
2. PT. KAI (Persero) Daop 6 Yogyakarta sebaiknya melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan mengenai *good corporate governance* lebih intens. Upaya yang dilakukan seperti membuat buku saku mengenai panduan *good corporate governance* bagi

- seluruh karyawan diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan.
3. PT. KAI (Persero) Daop 6 Yogyakarta sebaiknya dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar menjadi perusahaan yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Djanegara, Soerja. 2008. *Menuju Good Corporate Governance*. Bogor: Kesatuan Press.

Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN.

Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance*. Jakarta: KNKG.

Sutedi, Andriani. 2011. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zarkasyi, Wahyudin, 2008. *Good Corporate Governance: Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabeta.

Internet:
<http://www.bps.go.id/> diakses tanggal 23

Maret 2013.